

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Grand Theory dalam penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*. Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi Dimana para manager tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini berasumsi bahwa manajemen sebagai pihak yang berintegrasi tinggi, memiliki kejujuran dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan Tindakan sebaik-baiknya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *skateholders*.

Dalam teori ini manajer akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Berdasarkan asumsi teori *stewardship* yang menyatakan bahwa manajer akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil Keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan (pemenuhan kebutuhan) manajer atau *steward* dan pemilik atau prinsipal berasal dari organisasi yang kuat dan juga secara ekpnomi. Dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah manfaatnya ke teori *stewardship* yaitu informasi lebih berkualitas, berdasarkan teori ada hubungan positif antara kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan teori *stewardship*. Pemerintah yang bertindak sebagai manajer mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai principal dalam menilai akuntabilitas dan membuat Keputusan, baik Keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Pemerintah daerah selaku manajer wajib memberikan laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk LKPD yang telah di audit oleh BPK. Berdasarkan teori *stewardship* ini, kinerja kepala daerah akan dinilai dalam laporan pertanggungjawaban kepada DPRD tentang keberhasilan program dan kebijakannya

yang tercemrin pada realisasi APBD serta LKPD yang diperoleh pemerintah daerah (Puspitawati, 2016:12).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu Lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi Masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal (Wahida, 2015:20).

Objek penelitian ini adalah bagian dari organisasi sektor publik yaitu pemerintah daerah. Penelitian ini akan menguji efek pembelajaran teori *stewardship* terhadap Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.” Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013, SAP berbasis akrual adalah “SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan, ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran,”

Bastian (2010:10) mengemukakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut:

Persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kuakitas laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevamsi, dan keandalan laporan keuangan.

Standar Akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Standar sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan laporan keuangan. Tidak adanya

standar akuntansi akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inskonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan (Mardiasmo,2018:8).

Beberapa pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu prinsip-prinsip akuntansi dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pusat maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Struktur SAP berbasis akrual (Lampiran I Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010):

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aser Tetap
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pekerjaan
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional

2.1.2.2 Indikator Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam kesuksesan penerapan SAP, ada beberapa indikator yang dicantumkan dalam SAP berbasis akrual (Lampiran I Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010):

1. Penyajian laporan keuangan sesuai SAP;
2. Basis akrual pengakuan aset;
3. Basis kas pengakuan belanja ;
4. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Lengkap;
5. Penyusunan LAK sesuai SAP;
6. Penyajian arus kas masuk dan keluar;
7. Penyusunan CaLK secara lengkap;
8. Penyajian CaLK setiap periode pelaporan;
9. Pencatatan persediaan;
10. Pengakuan persediaan;
11. Penilaian investasi atas kepemilikan non-permanen;
12. Pencatatan investasi untuk kepemilikan permanen;
13. Pengklasifikasian Aset Tetap;
14. Pencatatan Aset Tetap;
15. Pengungkapan informasi KDP;
16. Pemindehan KDP;
17. Pencatatan kewajiban;
18. Pengakuan kewajiban;
19. Koreksi kesalahan berkala;
20. Koreksi kesalahan sesuai pedoman SAP;
21. Penyajian laporan keuangan konsolidasi semua entitas akuntansi;
22. Penyajian laporan keuangan konsolidasi setiap periode pelaporan;
23. Penyajian LO yang lengkap;
24. Penyusunan LO setiap periode akuntansi

2.1.3 Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah telah diatur dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2017. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum, Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negara tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintah sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara professional. Berdasarkan UU Nomor 13

Tahun 2003 Pasal 1 ayat 10 tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai standar yang ditetapkan. Pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 pasal 2 menjelaskan bahwa komitmen Pegawai Aparatur Sipil Negara terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah
- b. Menyuaikan standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah
- c. Memiliki pengalaman teknis, kemampuan manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan dalam pengelolaan Instansi Pemerintah

Dalam Pasal 2 ayat (2) Standar Kompetensi meliputi: pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sebagaimana dimaksud berkaitan dengan:

- a. Kebijakan Desentralisasi;
- b. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah;
- c. Pemerintahan Umum;
- d. Pengelolaan keuangan Daerah;
- e. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan
- g. Etika Pemerintahan.

Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang aparatur pemerintah sesuai dengan profesi yang dijalani untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan dilandasi bekal Pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan demi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dengan adanya aparatur pemerintah yang berkompeten maka penyampaian laporan keuangan akan menjadi baik pula sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Indikator dari Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terdiri dari 3 aspek yang telah disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) standar Kompetensi , meliputi:

1. Pemahaman mengenai peran dan fungsi sebagai pengelola keuangan
2. Menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi
3. Mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan keuangan
4. Bekerja sesuai dengan latar belakang Pendidikan yang dimiliki
5. Bekerja dengan mengedepankan etika
6. Menolak setiap intervensi atasan

2.1.4 *Good Governance*

2.1.4.1 Pengertian *Good Governance*

Menurut Mardiasmo (2018:32), Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* (dalam Nofianti, 2015:50), mendefinisikan *good governance* sebagai berikut:

“*Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen Pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun *administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”

Bila dilihat dari beberapa pengertian *Good Governance* menurut para ahli, maka dapat disimpulkan mengenai *Good Governance* lebih berfokus pada pengelolaan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi dengan tata Kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat secara bertanggungjawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi (Mardiasmo,2018:23):

1) *Participation*

Keterlibatan Masyarakat dalam pembuatan Keputusan yang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2) *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

3) *Responsiveness*

Lembaga-lembaga public harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

4) *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada dan Masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

2.1.4.2 Indikator Good Governance

Good Governance memiliki indikator menurut *United Nations Development Programme (UNDP)* atau Badan Program Pembangunan PBB, yaitu (Mardiasmo,2018:23):

1. Partisipasi dalam membuat kebijakan;
2. Partisipasi dalam pemerintahan;
3. Pengembangan sistem akuntansi untuk publikasi berdasarkan SAP;
4. Publikasi informasi untuk pihak yang berkepentingan;
5. Cepat dan tangkap dalam memberikan pelayanan;
6. Penyampaian informasi dengan cepat, utuh, dan tepat waktu;
7. Pertanggungjawaban secara rutin dan tertulis;
8. Penyajian laporan keuangan setiap periode pelaporan bentuk pertanggungjawaban;
9. Akuntabilitas partisipasi public
10. Responsivitas
11. Kepatuhan terhadap hukum
12. Efektifitas dan efisiensi

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.1.5.1 Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah “serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pelaporan posisi keuangan, pengikhtisaran pencatatan, dan operasi keuangan pemerintah.” Sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti computer dan printer, tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu software data yang lebih terpenting lagi adalah orang.

Komputer utama sistem teknologi informasi berupa:

1. Perangkat Keras (*hardware*)
2. Perangkat Lunak (*software*)
3. Orang (*Brainware*)

Teknologi informasi merupakan sarana yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, Menyusun, dan menyimpan data dengan berbagai macam cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

Teknologi informasi saat ini dapat meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*) perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al, 2000).

(Williams dan Sawyer, 2003) mendefinisikan teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan computer (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan video.

Perkembangan teknologi semakin lama semakin meningkat. Teknologi informasi (TI) ini berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu proses pengelolaan dan penyebaran data dengan memanfaatkan alat perangkat computer dan telekomunikasi untuk kegiatan yang dilakukan seseorang. Teknologi informasi di Indonesia ikut berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin modern. “Perkembangan teknologi penyimpanan data, dan teknologi komunikasi” (laundon.K.C., 2014:24).

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju akan memudahkan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan yang lebih akurat dan tepat serta memiliki kemampuan menyimpan data yang lebih besar. Pekerjaan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, akan tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi ini akan membutuhkan dana yang lebih besar, sesuai dengan pembahasannya Teknologi informasi merupakan sarana yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, Menyusun, dan menyimpan data dengan berbagai macam cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

2.1.5.2 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi memiliki indikator menurut *Jurnali dan supomo*, yaitu (Wilkinson et al,2000):

1. Bagian akuntansi/keuangan memiliki computer yang cukup untuk melaksanakan tugas
2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja
3. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara berkompentensi
4. Pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
6. Peralatan yang using atau rusak didata dan di perbaiki tepat pada waktunya.

2.1.6 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.6.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Iman (Mulyana, 2010:96), “Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur bersasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”.

Pernyataan SAP No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan salah satu factor yang menggambarkan kinerja suatu daerah. Pengungkapan informasi akuntansi dalam laporan keuangan tahunan merupakan suatu komponen yang signifikan dalam mencaoi sarana akungabilitas public (Almahara & Hermiyetti, 2016:445)

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan merupakan laporan yang tersstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang digunakan untuk pengambilan Keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja dari program dan kegiatan realisasi dari pencapaian target pendapatan, pemyerapan belanja, dan pembiayaan (Bastian. 2010:97).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam PP No.

71 Tahun 2010 meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemaikaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
- c. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode.
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
6. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendnaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaam, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
7. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realiasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keungan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapkan-ungkapan yang perlu diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan menyebutkan bahwa pelaporan keungan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat, bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat Keputusan baik Keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.

- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau oenurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.6.2 Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Lampiran 11.02, Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi Keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pemberian informasi keuangan yang tidak dapat diandalkan akan mempengaruhi kualitas Keputusan bagi pemakai internal maupun pemakai eksternal.

Secara spesifik, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Lampiran 1.02, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan Keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk mebiayai seluruh pengeluaran
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telahdicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman

2.1.6.3 Peranan Pelaporan Keuangann

Sebagaimana diatur dalam Pemerintah Pemerintah No.71 Tahun 2010 Lampiran II.01, Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (PP.No 71 Tahun Lampiran II.01):

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan Masyarakat.
- c. Tranparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan peetimbangan bahwa Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antaragenerasi (*intergenerational equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan

akan ikut dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

- e. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.1.6.4 Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Laporan keuangan pemerintah provinsi/kota/kabupaten terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur yaitu pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 3) Neraca
Neraca menggambarkan posisi anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 4) Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah akuitas dan penggunaannya yang di Kelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- 5) Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahan pusat/daerah selama periode tertentu.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau terinci dari angka tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.6.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Kualitas Laporan Keuangan tercermin dari karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi Keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan Keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan Keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang di perbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	VARIABEL	HASIL
1.	Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, <i>Good Govarnance</i> dan sistem pengendalian intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kementrian dan Ketenagakerjaan (Yulianda ayu Reswari, Namel Nazir,2022)	a. Standar Akuntansi Pemerintah (X1) b. <i>Good Public Govarnance</i> (X2) c. Sistem Pengendalian intern Pemerintah (X3) d. Kualitas Laporan Kementrian Ketenagakerjaan (Y)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan kementrian ketanegaraan <i>Good public governance</i> berepengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada kementrian ketenagakerjaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan kementrian ketenagakerjaan.

2.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Emilda Nur safari dan Pingky Dezar Zulkarnain,2021)	a. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) b. Sistem Pengendalian Internal (X2) c. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) d. Kualitas Laporan	Sumber daya manusia dan sitem pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3.	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Ikang Murapi,2020)	a. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) b. Pemanfaatan teknologi Informasi (X2) c. Komitmen Organisasi (X3) d. Kualitas Informasi Pada Laporan Keuangan (Y)	Secara Parsial, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen organisasi Pemerintahan berpengaruh positif Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.	Determinan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua (Asrida, Meinanrni Asnaw, Syaikhul Fallah,2018)	a. Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) c. Tekanan eksternal (X3) d. Akuntabilitas (Y)	Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara tekanan eksternal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penyajian laporan keuangan termasuk tekanan eksternal secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
5.	Pengaruh Penerapan SAP dan <i>Good Govarnance</i> Terhadap Kualitas laporan Keuangan pemerintah daerah (Defi Nopianti	a. Penerapan SAP Pemerintahan (X1) b. Penerapan <i>Good Govarnance</i> (X2)	Penerapan SAP dan Good Govarnance secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

	dan tuti Herawati,2017	c. Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Good Govarnance memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6.	Pengaruh <i>Good Govarnance</i> , Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualiras Laporan Keuangan Pemerinta pada satuan Kerja Kementrian Pariwisata (Desmaria Puji Kesuma, Choirul anwar, dan Darmansyah,2017)	a. <i>Good Govarnance</i> (X1) b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2) c. Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Secara parsial, Good Govarnance dan Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara Simultan, Good Govarnance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan
7.	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Komitmen Organisasi Pemerintah dan Paritisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Sarifuddin Mada, Lintje Kalangi, dan Hendrik Gamaliel,2017	a. Kompetensi Aparatur Pemerintah (X1) b. Komitmen Oranisasi Pemerintah (X2) c. Partisipasi Masyarakat (X3) d. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)	Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Komitmen Organisasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daearah..
8.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Gursya Indria Sari dan Fadli,2017)	a. Penerapan <i>Good Govarnance</i> (X1) b. Penerapan SAP (X2) c. PemanfaatanS item Informasi akuntansi Keuangan Keuangan Daerah (X3)	Penerapan good governance tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pembaftaan sitem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap

		d. Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	kualitas laporan keuangan daerah.
9.	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitemen Organisasi dan Kejelasan Tujuan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Rahman Arif,2017)	a. Pemanfaatan teknologi Informasi (X1) b. Komitmen organisasi (X2) c. Kejelasan Tujuan (X3) d. Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada SKPD Kota Padang Panjang (Y)	Pemanfaatan Teknologi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Komitemn organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
10.	Pengaruh Penerapan SAP, Kualitas Aparatur Pemerintah daerah dan <i>Good Govarnance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014) (Mia Oktarina,Kharis Raharjo, dan Rita Andini,2016)	a. Penerapan SAP(X1) b. Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (X2) c. <i>Good Govarnance</i> (X3) d. Kualitas Laporan Keuangan (Y)	SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah <i>Good governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017 sampai 2022

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2022:22) “kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang hubungan teori dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Pada Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di

Indonesia. SAP memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

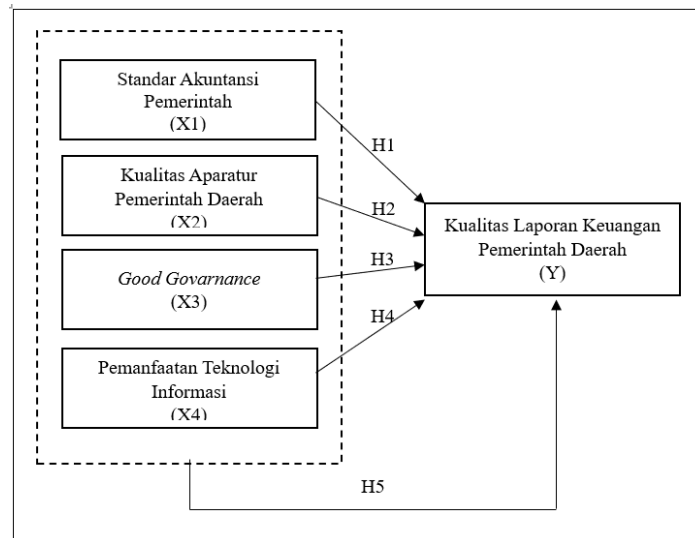
Kualitas merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Aparatur pemerintah daerah yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu. Dengan adanya kompetensi aparatur pemerintah daerah pemerintah daerah tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan Keputusan (Mardiasmo, 2002:146)

Pengelolaan keuangan organisasi perangkat daerah yang menerapkan *good governance* secara efektif sangat potensial dalam menentukan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri dan kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan Masyarakat, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

Mustafa (2011:59), adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterlaksanaan dan ketepatanwaktuan pada laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterlaksanaan dan ketepatanwaktuan pada laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi.. Hubungan variabel dalam penelitian ini

diilustrasikan melalui kerangka konseptual, yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu pada gambar 4.2.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2022:22) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis masih terbilang sementara disebabkan karena jawaban yang diberikan baru didasarkan dengan teori yang relevan, belum didasarkan dengan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dengan kata lain hipotesis sebagai jawaban yang bersifat teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

2.4.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah atas pelaksanaan APBD, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah untuk Menyusun laporan keuangan laporan keuangan yang berkualitas, yang mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang mencakup tertib administrasi dan taat atas, sehingga dapat bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat Keputusan, baik Keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta

memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Dengan mengacu pada SAP maka diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat dibandingkan dan berguna untuk penilaian kinerja pemerintah. Jadi, semakin baik Penerapan SAP maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah. Maka dapat dinyatakan bahwa dengan adanya Penerapan SAP akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hal ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Mia Oktarina, dkk, 2016) tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang, yang menghatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Semarang. Artinya, semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka semakin baik kualitas laporan keuangan.

H₁ : Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.4.2 Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2017, Kompetensi Aparatur Pemerintah adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang di perlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negara tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.

Hal ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sarifuiddin Mada, dkk 2017:40) tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Komitmen Organisasi Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, yang menyatakan bahwa Kualitas Aparatur

Pemerintah Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin baik penerapan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah maka semakin baik kualitas laporan keuangan.

H₂ :Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.4.3 Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengelolaan keuangan organisasi perangkat daerah yang menerapkan *good governance* secara efektif sangat potensial dalam menentukan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri dan kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan Masyarakat, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

Dalam rangka untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban, selain mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku, suatu pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya juga harus menerapkan 9 karakteristik pelaksanaan *good governance* yang diterapkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* atau Badan Program Pembangunan PBB, sehingga terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik. Karakteristik tersebut terdiri dari: *Participation, Rule of law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Efficiency and Effectiveness, Accountability, dan Strategic vision*. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi Masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Defi Nopianti,dkk (2017) tentang Pengaruh Penerapan SAP dan *Good Governance* Terhadap Kualitas laporan Keuangan pemerintah daerah , yang menyatakan bahwa *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi Masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. . Artinya, semakin baik penerapan *good governance* maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan.

H₃ : *Good Governance* Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.4.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Mustafa (2011:45), adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pada laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Ikang murapi (2020) tentang Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah, yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Artinya, semakin baik penerapan pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan.

H₄ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas laporan Keuangan

2.4.5 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, *Good Governance* dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah variabel Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, *Good Governance* dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Kualitas Laporan Keuangan. hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, *Good Governance* dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₅ : Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, *Good Governance* dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan